

LAPORAN SEMESTER II TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



2023

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

DISUSUN OLEH,

KETUA TIM PELAKSANA TPPS

WAKIL KETUA TPPS

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si

SEKRETARIS TPPS

WAKIL SEKRETARIS TPPS

Hj. ANDI MIRNA, S.H.

SHODIQIN, S.H., M.M.

KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN
INTERVENSI SENSITIF DAN
INTERVENSI SPESIFIK

KOORDINATOR BIDANG PERUBAHAN PERILAKU
DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

Dr.dr.H. M. ISHAQ ISKANDAR, M.Kes,MM,MH

Hj. ANDI MIRNA, S.H.

KOORDINATOR BIDANG KOORDINASI DAN
KONVERGENSI

KOORDINATOR BIDANG DATA, MONEV DAN
KNOWLEDGE MANAGEMENT

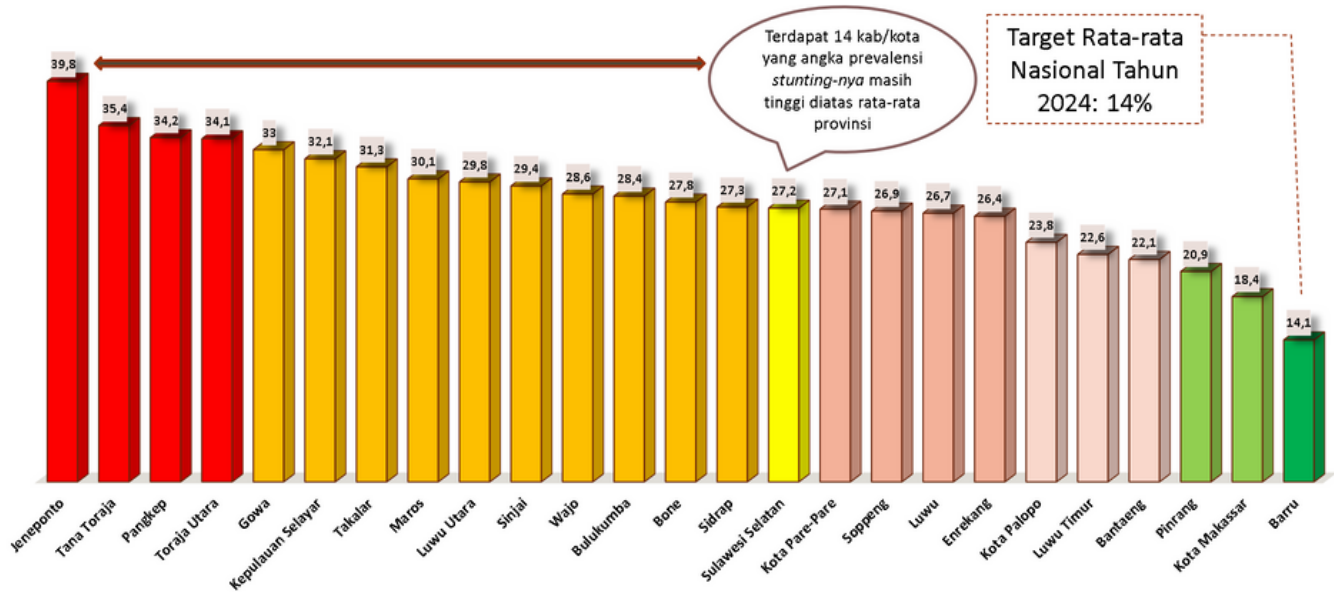
Ir. H. ANDI BAKTI H., C.E.S.

Prof. SUKRI PALUTTURI, SKM, M.Kes., M.Sc.PH.,Ph.D



EXECUTIVE SUMMARY

PREVALENSI STUNTING MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022



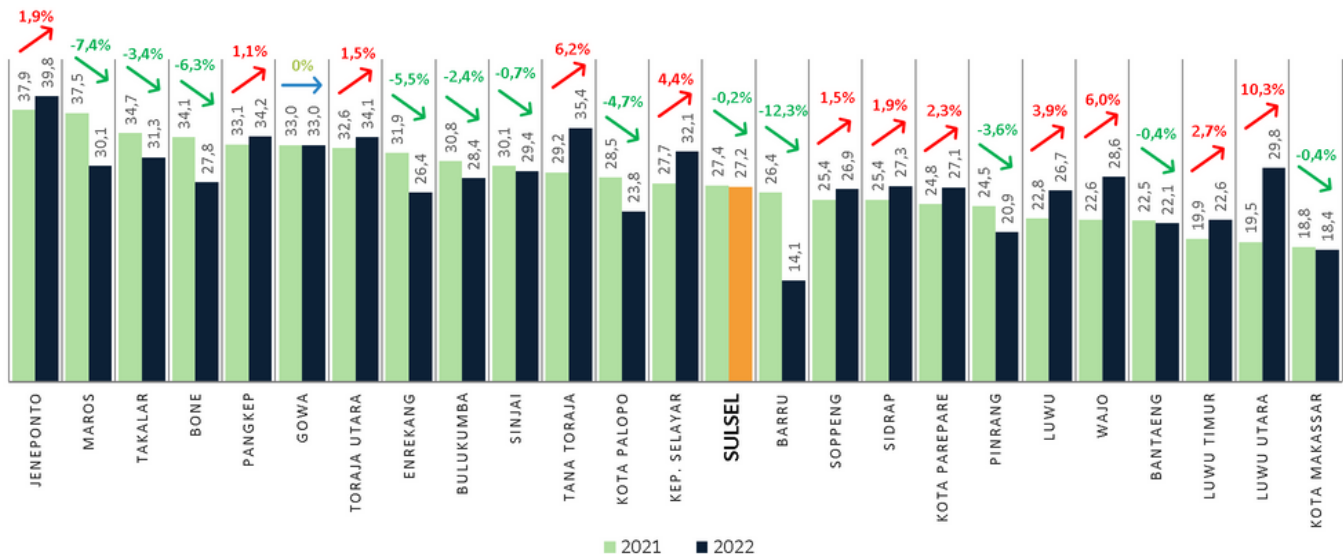
Sumber: SSGI Tahun 2022

Dari total 24 kabuapten/kota ada 12 Kabupaten yang mengalami penurunan angka stunting yang mempunyai Inovasi program dan bisa di rekomendasikan untuk dilanjutkan, dikembangkan dan di adopsi oleh daerah lain diantaranya kab Barru, Enrekang, Maros, Pinrang, Bone, Takalar dan Palopo. Terlihat dengan Penurunan angka stunting rata-rata sebesar 3,4% - 12,3 %, Dari total 24 kabupaten/kota ada 11 Kabupaten yang mengalami peningkatan angka stunting . Terlihat dengan kenaikan angka stunting rata-rata sebesar 1,1% - 10,3 %.

Dari 11 kabupaten tersebut yang mempunyai Inovasi program hampir semua kabupaten hanya saja masih perlu strategi lain untuk memaksimalkan inovasi tersebut atau mengadopsi inovasi daerah lain yang berhasil menurunkan angka stunting. Kecuali kabupaten Selayar yang memang belum memiliki inovasi dan 1 Kabupaten yang angka stuntingnya stagnan yaitu di Kabupaten Gowa yang di harapkan dapat mengevaluasi kembali efektifitas pelaksanaan inovasi dan dapat terus



PREVALENSI STUNTING TAHUN 2021-2022

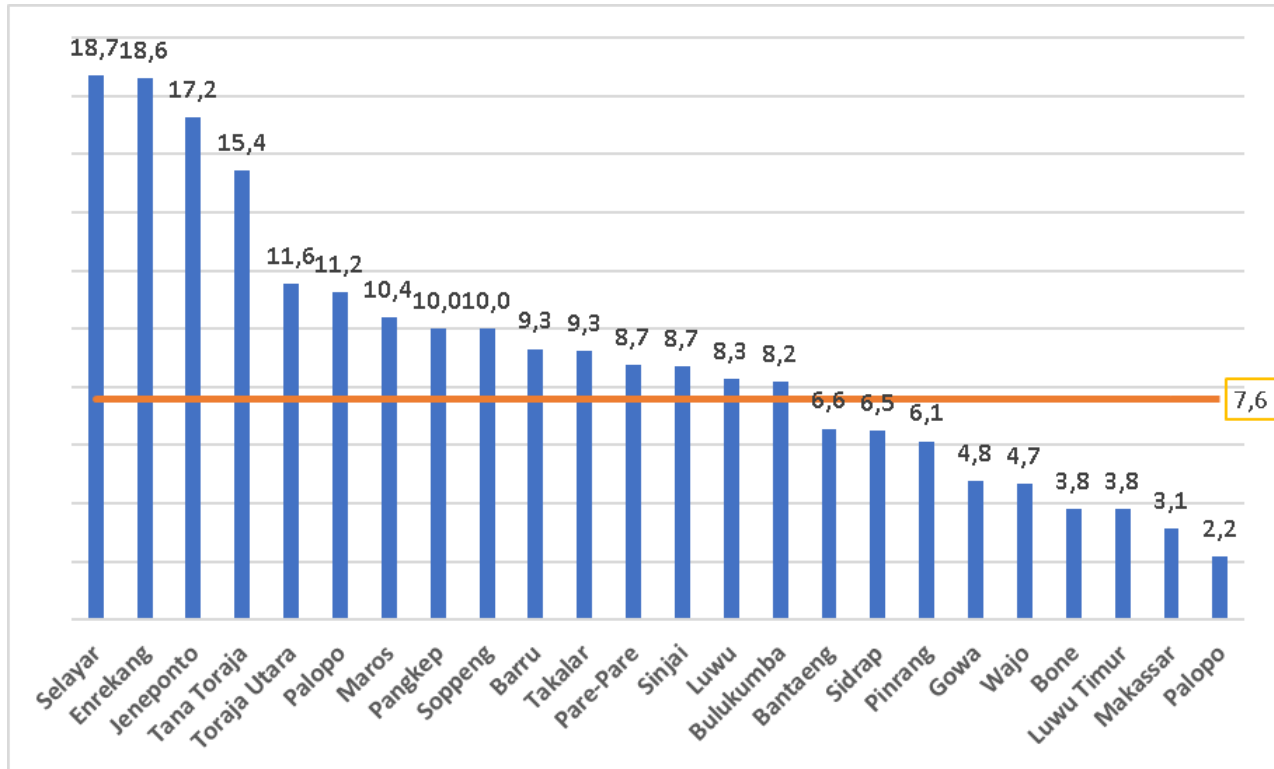


Sumber: SSGI Tahun 2021 & Tahun 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa beberapa gambaran 24 kabupaten/kota menurut data SSGI tahun 2021 dan 2022 Provinsi Sulawesi Selatan menurut SSGI yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tahun 2021 prevalensi stunting mencapai 27,4%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 27,2% terjadi penurunan 0,2% artinya masih perlu kerja keras untuk mencapai target yang dipersyaratkan WHO yaitu dibawah 20%.



PERSENTASE BALITA STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE AGUSTUS 2023 (%)



Berdasarkan hasil pengukuran balita periode Agustus 2023 jumlah balita yang berstatus stunting adalah sebanyak 42.659 atau sekitar 7,6 persen dari total balita yang diukur sebanyak 558.648, tercatat bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Selayar (18,7%) Kabupaten Enrekang (18,6%), Jeneponto (15,4%), Tana Toraja (15,4%) dan Toraja Utara (11,6%) merupakan lima daerah dengan persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, daerah yang menunjukkan persentase stunting terendah adalah Kota Palopo (2,2%), Kota Makassar (3,1%) dan Luwu Timur (3,8%).

Hasil pengukuran balita tersebut, pemerintah daerah mampu memetakan dan menentukan sasaran prioritas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, baik dari skala provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang terekam pada e-PPGBM diharapkan menjadi dasar dalam menyelenggarakan program perbaikan gizi balita, khususnya anak usia 0-23 bulan (baduta) sebagai kelompok prioritas program PPS, sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap pertumbuhan anak yang terdeteksi stunting.



CAPAIAN DAN TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (1)

12	KABUPATEN/KOTA Yang menunjukkan prevalensi <i>stunting</i> meningkat dan tidak sesuai dengan target tahun 2022.	No	KABUPATEN/KOTA	SSGI 2021 (%)	SSGI 2022 (%)	TARGET 2022 (%)	TARGET 2023 (%)	TARGET 2024 (%)
		1	Jeneponto	37,9	39,8	32,46	19,79	15,96
		2	Tana Toraja	29,2	35,4	25,02	22,14	17,91
		3	Pangkep	33,1	34,2	28,26	16,17	13,09
		4	Toraja Utara	32,6	34,1	27,92	27,23	22,03
		5	Gowa	33	33	27,97	24,74	19,94
		6	Kepulauan Selayar	27,7	32,1	23,65	23,22	18,59
		7	Takalar	34,7	31,3	29,6	21,64	17,52
		8	Maros	37,5	30,1	31,05	25,09	18,16
		9	Luwu Utara	19,5	29,8	19,66	23,63	19,06
		10	Sinjai	30,1	29,4	25,79	19,06	15,47
		11	Wajo	22,6	28,6	19,43	24,59	19,93
		12	Bulukumba	30,8	28,4	26,38	18,52	15,09
		13	Bone	34,1	27,8	29,26	16,36	13,3
		14	Sidrap	25,4	27,3	21,68	18,12	14,61
		15	Kota Pare-Pare	24,8	27,1	21,11	17,59	14,22
		16	Soppeng	25,4	26,9	21,91	22,84	18,45
		17	Luwu	22,8	26,7	19,47	16,28	13,13
		18	Enrekang	31,9	26,4	27,27	21	17
		19	Kota Palopo	28,5	23,8	24,01	13,93	11,24
		20	Luwu Timur	19,9	22,6	16,79	13,87	11,06
		21	Bantaeng	22,5	22,1	19,27	23,41	18,95
		22	Pinrang	24,5	20,9	20,97	13,28	10,66
		23	Kota Makassar	18,8	18,4	15,97	17,6	14,16
		24	Barru	26,4	14,1	22,67	19,82	15,78
		Sulawesi Selatan		27,4	27,2	23,4	19,52	15,64

Berdasarkan capaian survei status gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa terdapat 12 kabupaten/kota dimana angka prevalensi stunting meningkat yaitu Jeneponto, Tana Toraja, Pangkajene Kepulauan, Toraja Utara, Luwu Utara, Waji, Sidenreng Rappang, Kota Pare-pare, Soppeng, Luwu dan Luwu Timur, 7 kabupaten/kota prevalensi stunting-nya terjadi penurunan tetapi tidak sesuai dengan target yaitu Takalar, Maros, Sinjai, Bulukumba, Bone, Bantaeng dan Kota Makassar, 1 kabupaten stagnan yaitu Kabupaten Gowa. Sementara itu terlihat bahwa capaian juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan dimana terdapat 4 kabupaten/kota angka prevalensi stunting menurun dan melampaui target yaitu Enrekang, Kota Palopo, Pinrang dan Barru.



TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (2)



Target prevalensi stunting menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di proyeksikan/diharapkan terjadi penurunan sebesar 19,52% dengan berbagai skenario kebijakan yang dilakukan, sementara itu pada Tahun 2024 target yang diharapkan terjadi penurunan prevalensi stunting 15,64% dimana target tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkontribusi secara nasional dalam menurunkan stunting.

Tentu banyak hal yang akan dilakukan dalam pencapaian target tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021.



ALOKASI BELANJA DAERAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

No	Kabupaten	Anggaran	OPD Yang terlibat
1	Gowa	18.994.412.350	Dinkes, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan pangan, DPMD, DP2KB, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Tarkim, Bappelibangda, Dinas Persandian dan kominfo, Kemenag
2	Pangkep	5.828.190.156	Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan pangan, DPMD, DP2KB3A, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas PUTR, Bappelibangda
3	Bantaeng	13.062.084.546	Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan pangan, PMD, DinsosP2KB3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo,
4	Selayar	19.530.334.800	Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, PMD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, kemenag, Dinas DPPKB
5	Maros	24.468.740.631	Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, PMD, DinsosP2KB3A, Disdik, Dinas Kominfo, kemenag, Dinas PUPR, Bappelitbangda
6	Luwu Timur	21.083.226.013	Dinkes, DP2KB, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, DPMD, Dikbud, kemenag,
7	Makassar	60.247.420.020	Dinkes, DP2KB, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, PMD, Dinas Pendidikan kebudayaan pemuda dan olah raga, Dinas Kominfo, kemenag, Dinas PU Cipta karya, Bappelitbangda
8	Wajo	7.840.120.900	Dinkes, Dinas PU, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, PMD, DinsosP2KB3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, kemenag
9	Pinrang	9.579.363.300	Dinkes, Dinas Bina Marga, cipta karya dan tata ruang, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura, DPMD, Dinas Perumahan, permukiman dan lingkungan hidup
10	Barru	23.668.693.712	Dinkes, DPMDP2KB3A, Dinsos,, Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, PMD, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Cipta Karya dan Tarkim, lainnya
11	Palopo	35.426.849.881	Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas PU, PMD, DPPKB, Dinas Kominfo, Bidang Pemerintahan, Bappeda, Disdik Kebudayaan,
12	Sidrap	152.379.373.674	Dinkes, Dinas P2KB, Dinas ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Perikanan, Kemenag
13	Luwu	5.932.034.833	Dinkes, DPPKB, Dinas Perkim, Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial



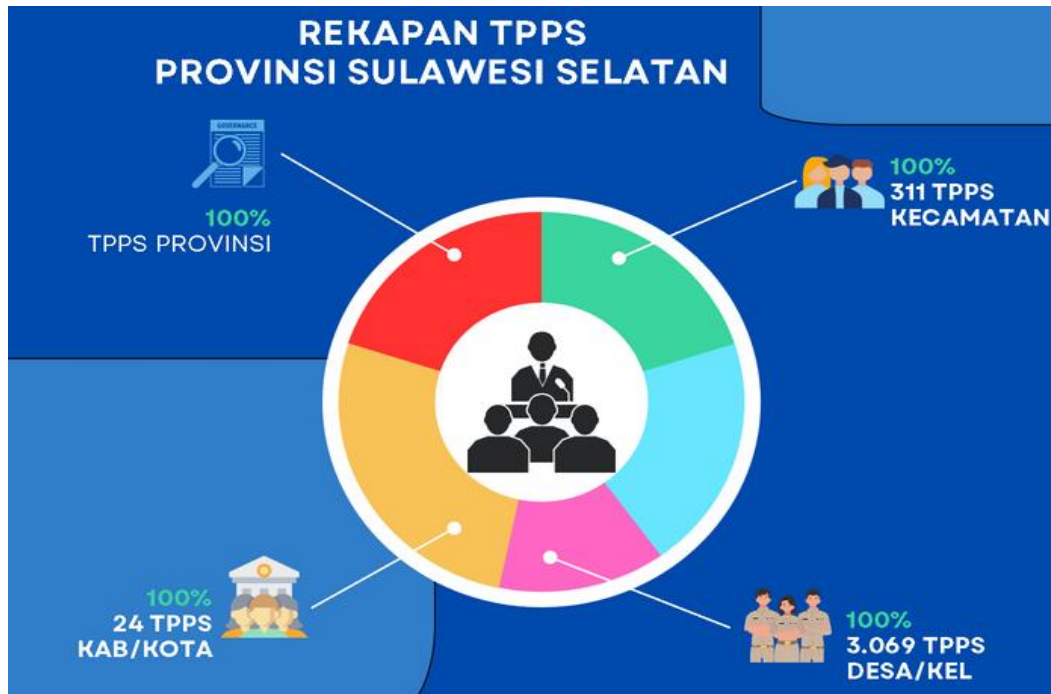
LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Kabupaten	Anggaran	OPD Yang terlibat
14	Tana Toraja	6.480.496.000	DP3P2KB, Dinkes, Dinas Pertanian , Dinas Pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga,
15	Bulukumba	46.005.377.298	Dinkes, Dinas KB, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian , PMD, Disdik Kebudayaan Pemuda dan olahraga
16	Pare-Pare	53.830.715.520	Dinkes, Dinas Pertanian dan Kelautan , Dinas PU , PMD, DPPKB, Dinas Kominfo, Bagian Pemerintahan, Bappeda, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, bappelitbangda
17	Takalar	10.587.990.400	Dinkes, Dinas P2KBP3A, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian , Kominfo, Dinas Pendidikan
18	Luwu Utara	146.117.915.670	Dinkes, Dinas P2KBP3A, Dinas Perikanan dan ketahanan Pangan, Dinas Pertanian , Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PUTR, Bappelitbangda, Kemenag
19	Soppeng	98.788.002.897	Dinkes, DP3AP2KB, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian , Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU, Bappelitbangda, Kemenag , badan Kesatuan bangsa dan Politik
20	Enrekang	13.764.546.900	DisdaldukKB, Dinkes, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian , Kominfo, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUTR, Kemenag , Dinsos, Dinas P3A,
21	Sinjai	22.403.563.160	Dinkes, DP2KB, Dinas Perikanan , Dinas Pertanian , Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU, Dinsos
22	Toraja Utara	10.148.435.115	Dinkes, DP3AP2KB, Dinas Pertanian , Dinas Kominfo, DPML, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUTR, Dinsos, Dinas Pendidikan
23	Bone	185.982.913.125	Dinkes, DP2KB, Dinas Perikanan , Dinas Kominfo, DPMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinsos, Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas PU, DP2P3A , Lainnya
24	Jeneponto	1.519.033.000	Dinkes, DP2KB, Dinas Ketahanan Pangan , Dinsos
Total Anggaran		993.669.833.901	



LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



SATGAS STUNTING





STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (1)

01

Telah terbentuknya tim TPPS disemua jenjang

02

Telah terbentuknya tim satgas percepatan penurunan stunting, tim pendamping keluarga, tenaga pendamping gizi desa (TPGD) melalui program aksi stop stunting dan telah diberikan orientasi atau peningkatan kapasitas

03

Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan 24 kabupaten/kota

04

Pertemuan kemitraan TPPS tingkat provinsi melalui focus group discussion (FGD) bersama dengan mitra pembangunan dan organisasi masyarakat (CSO)

05

Penguatan komitmen perguruan tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting



06

Internalisasi pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting

07

Telah dilaksanakannya surveillance data stunting

08

Rekonsiliasi Stunting tingkat Provinsi dan Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan

09

Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan

10

Rapat Kerja masing-masing bidang TPPS Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan



11

Pertemuan Tim Teknis dan Tim Pakar Audit Kasus Stunting

12

KIE Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja

13

Pelaksanaan 8 aksi konvergensi dan Kegiatan Inovasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

14

Tagging perencanaan penganggaran terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting

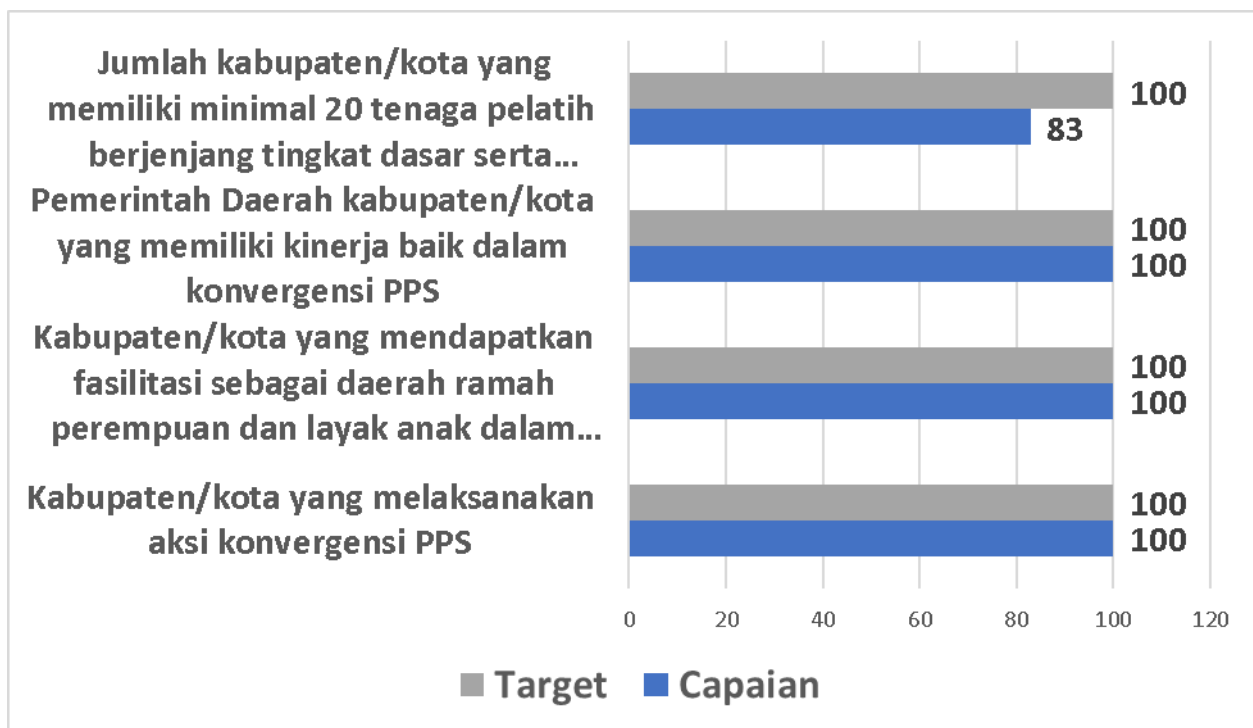
15

Monitoring Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota



PENCAPAIAN INDIKATOR

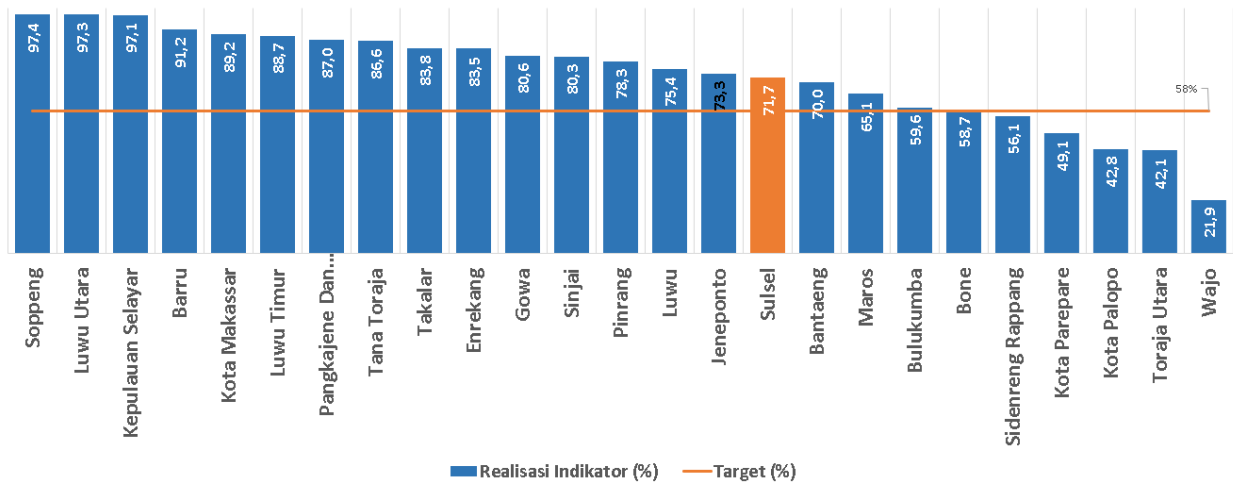
**CAPAIAN AKSI KONVERGENSI, FASILITASI DAERAH
RAMAH PEREMPUAN DAN LAYANAN ANAK DALAM PPS
TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN**



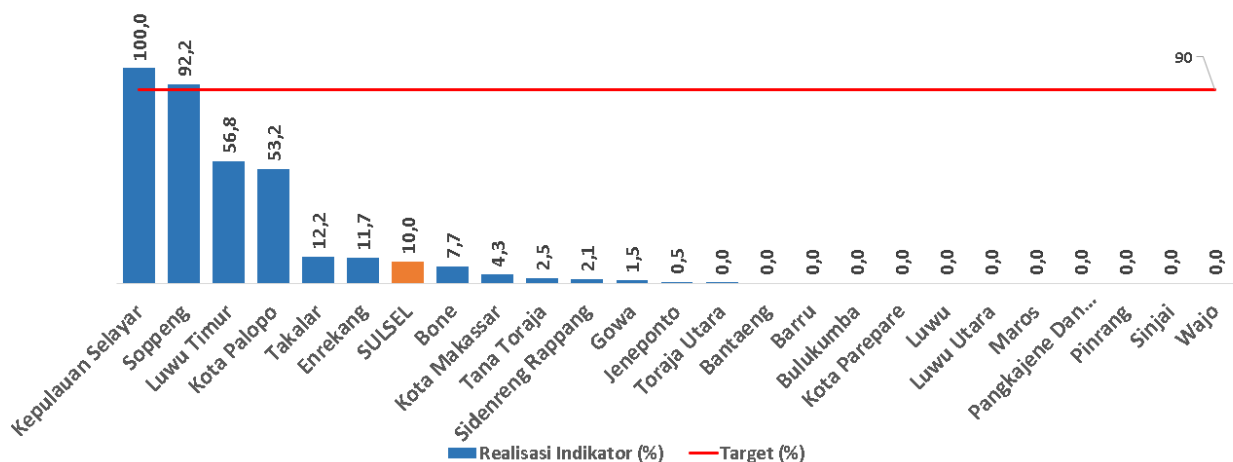


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)



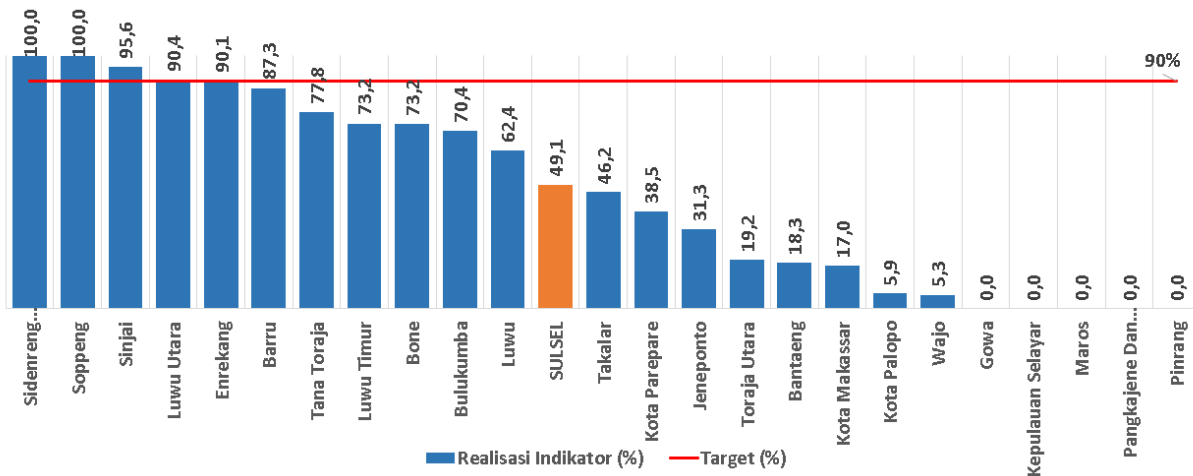
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)



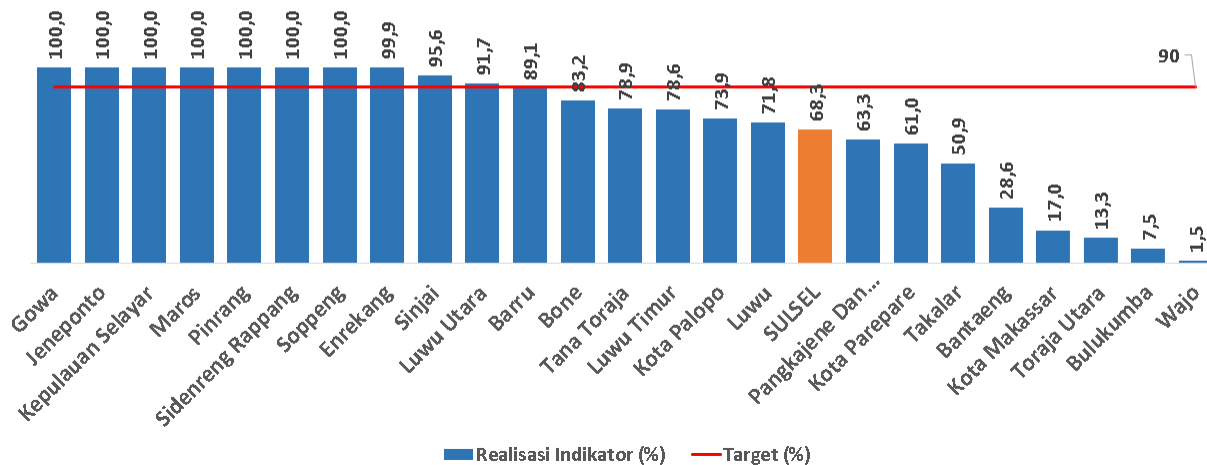


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)



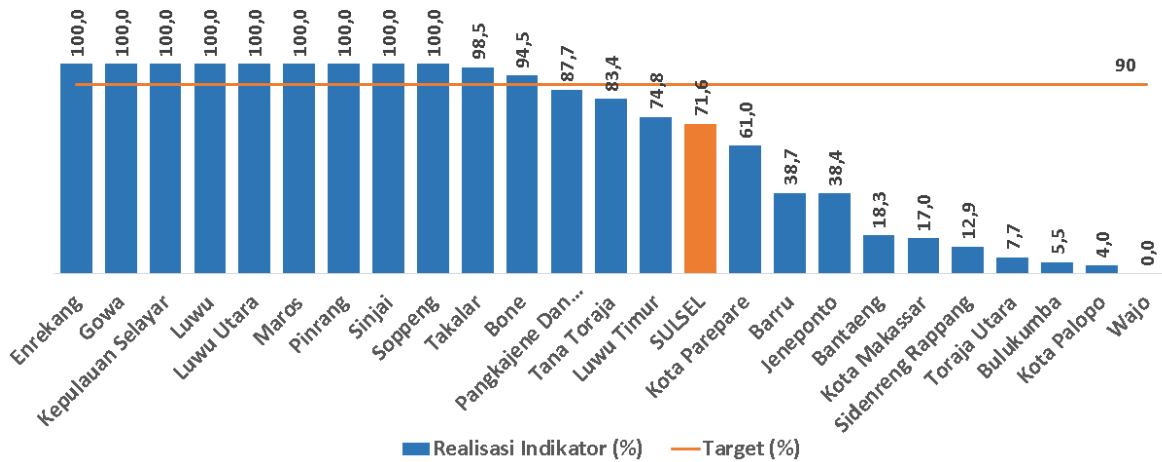
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah



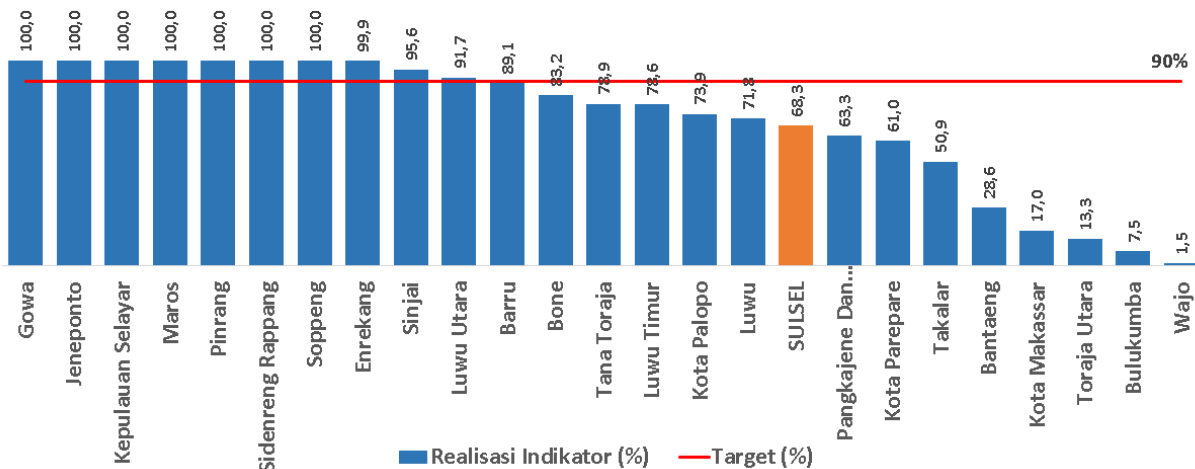


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting



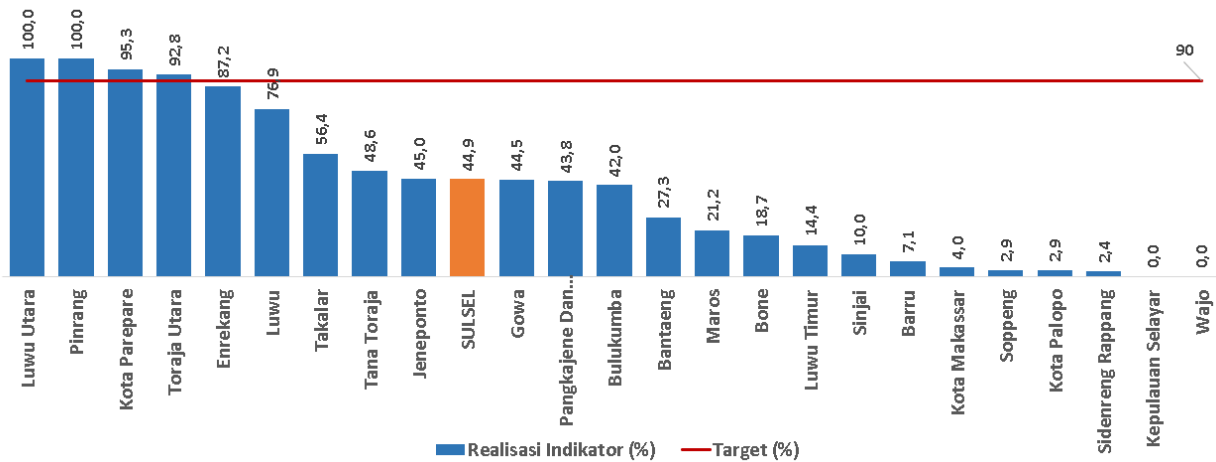
Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah



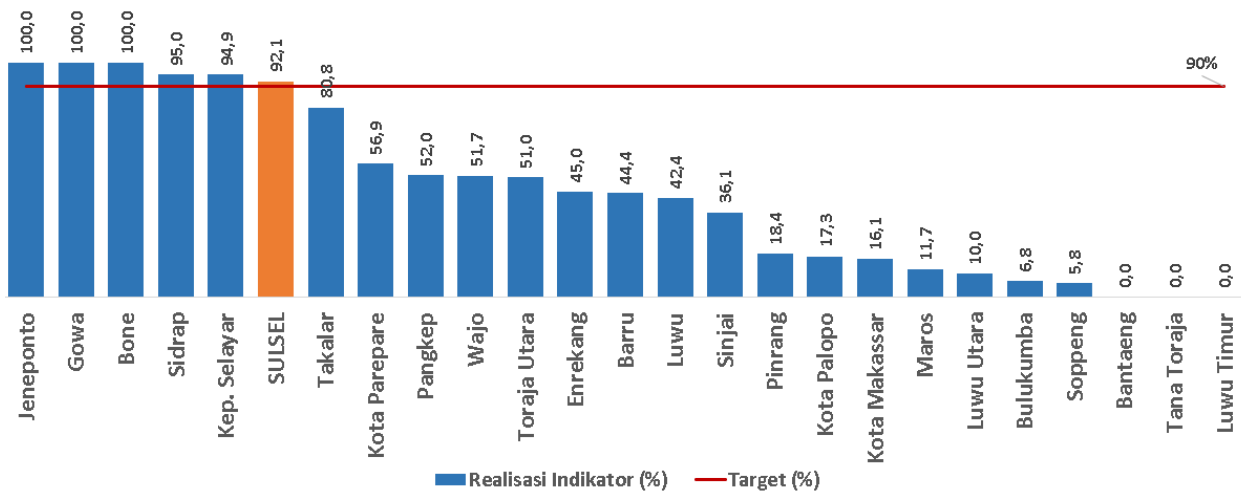


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat



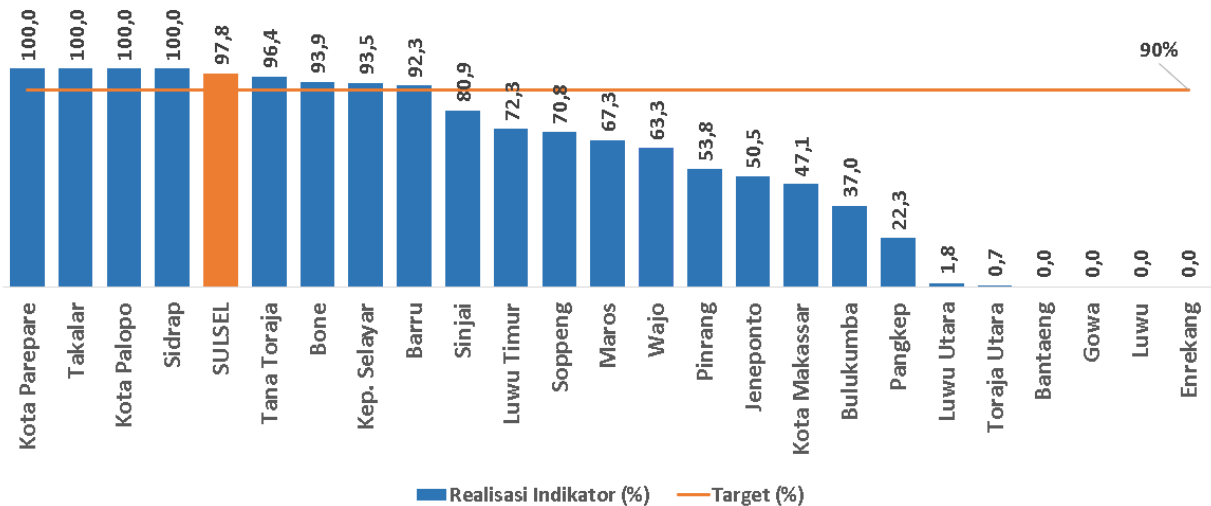
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai



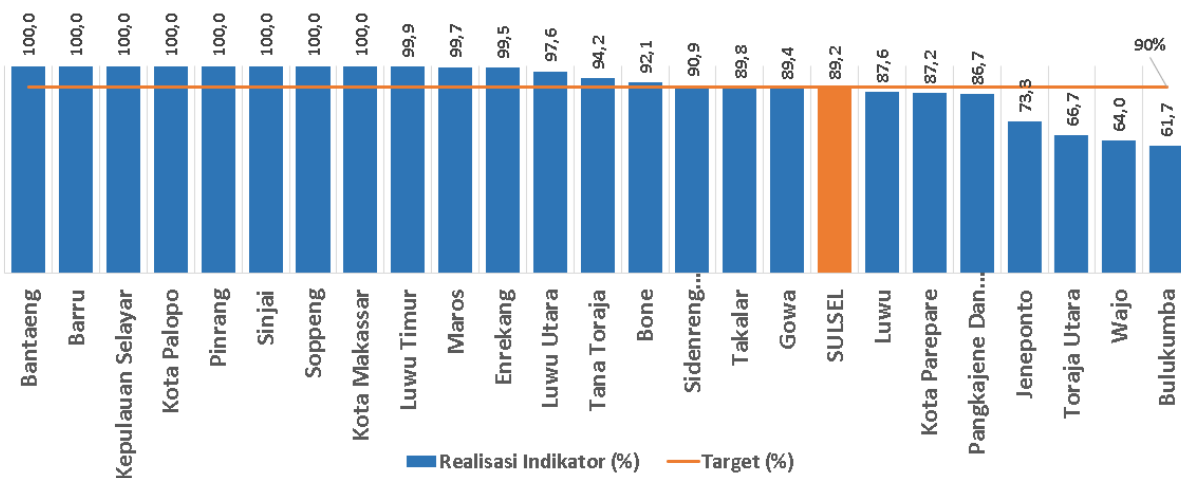


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

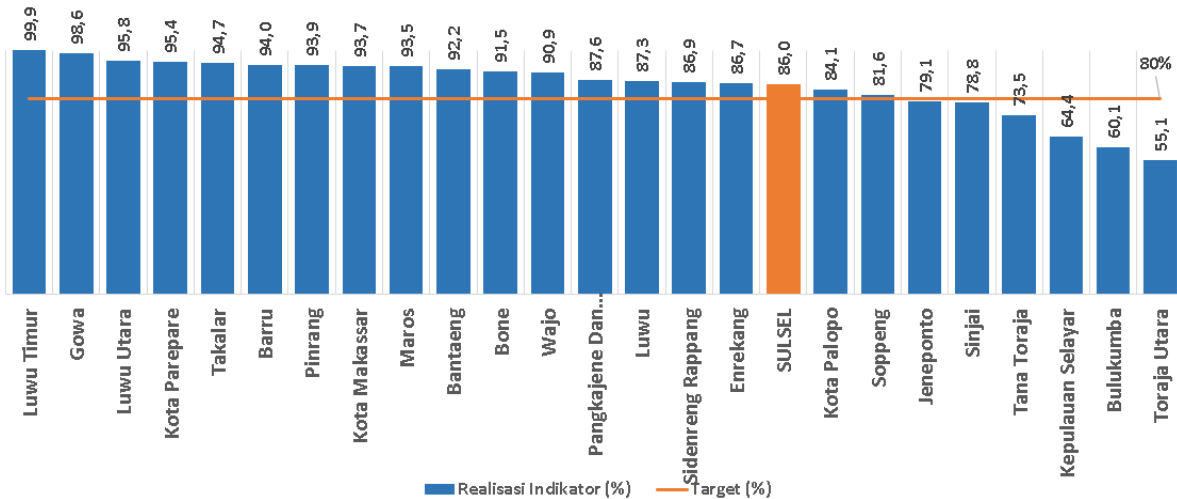


Bumil Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

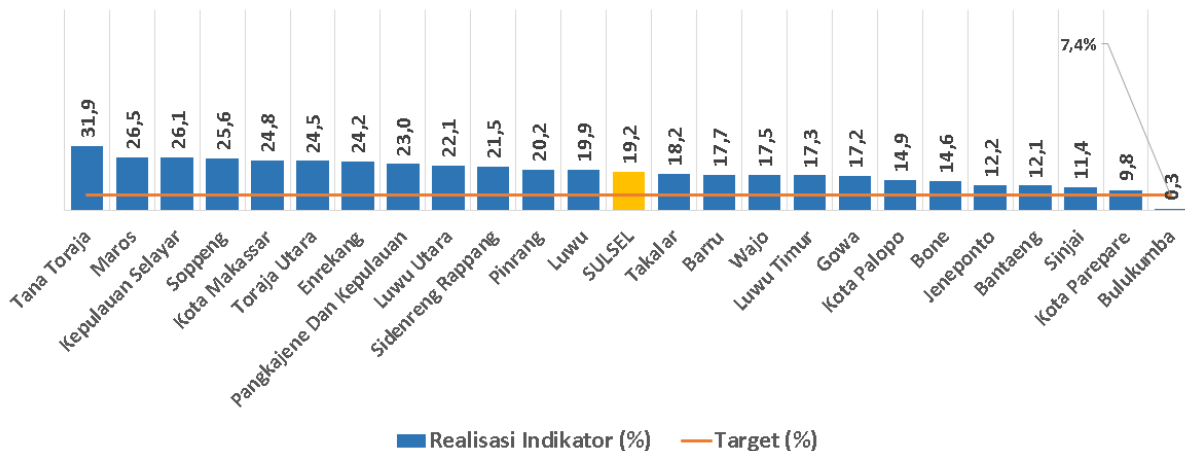




Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan

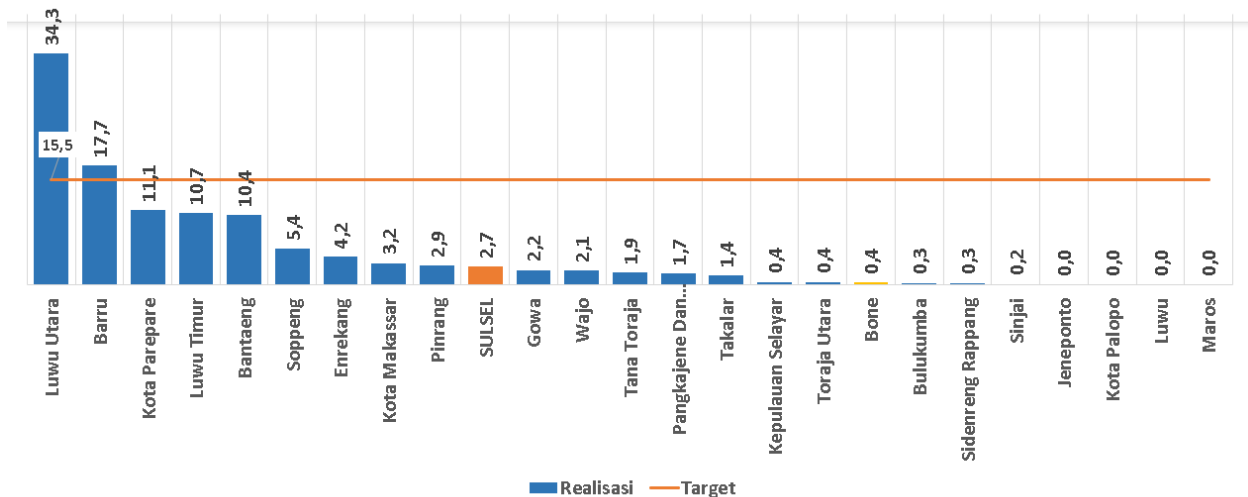


Persentase Unmet Need pelayanan
Keluarga Berencana

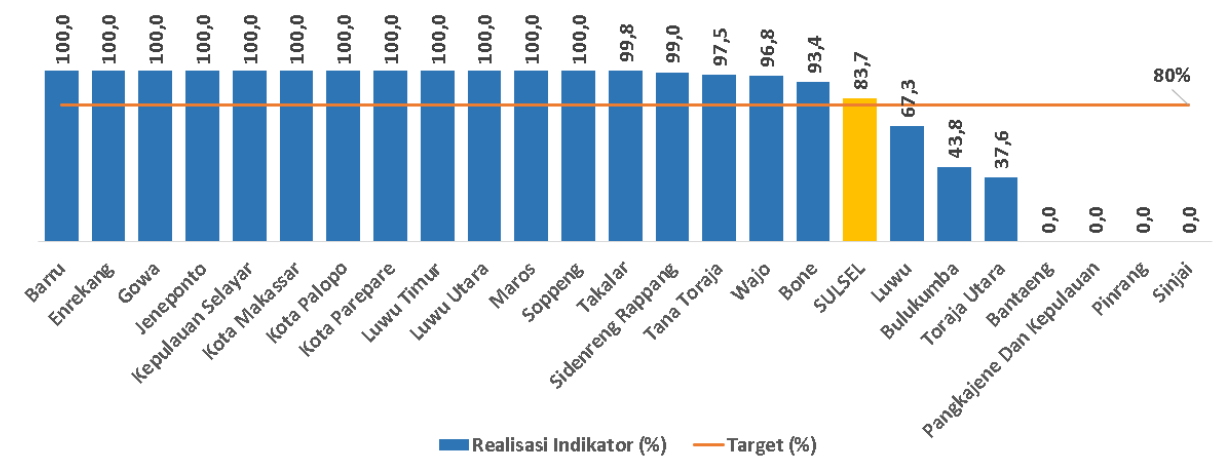




Persentase kehamilan yang tidak diinginkan

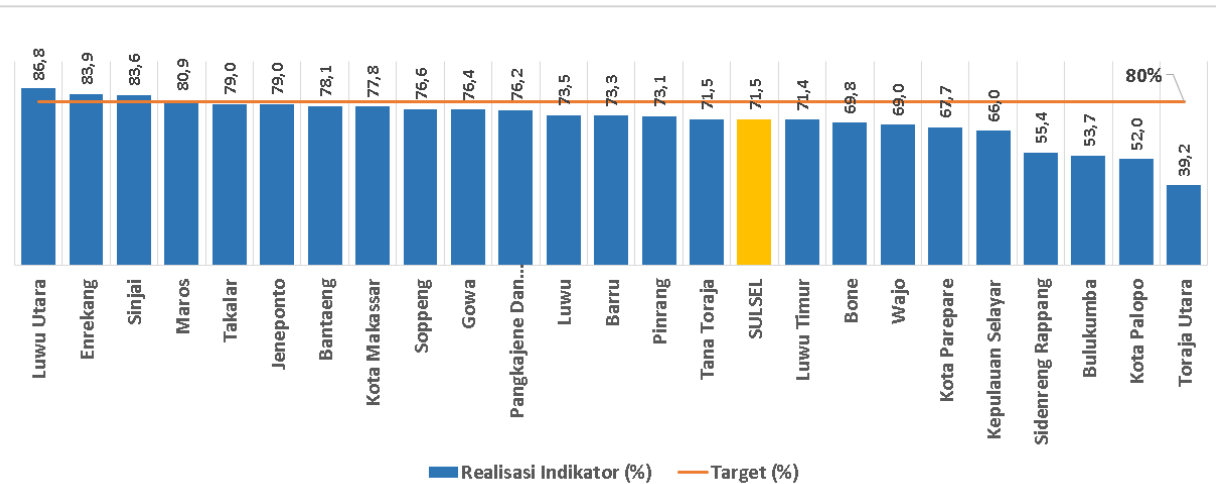


Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

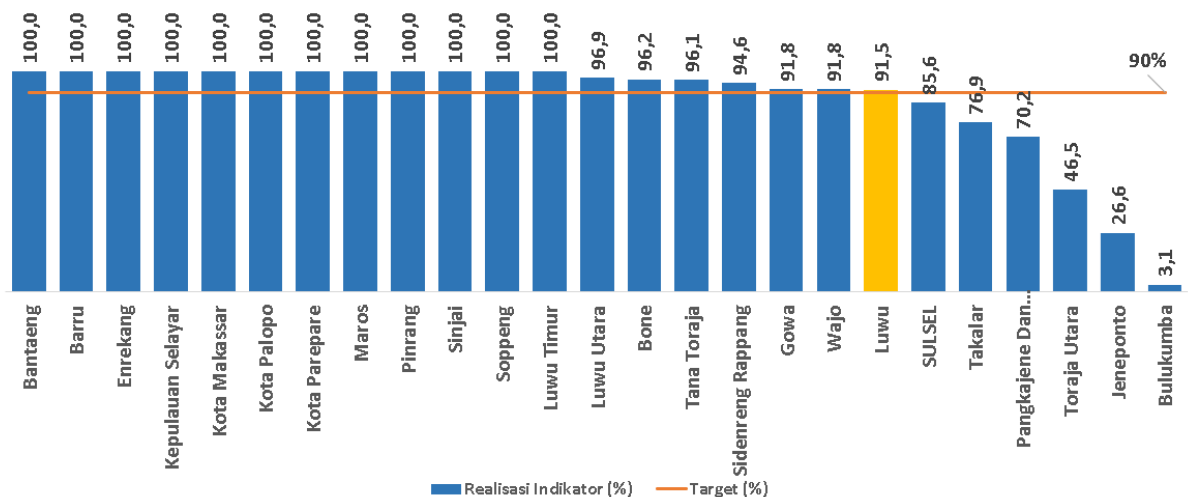




Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

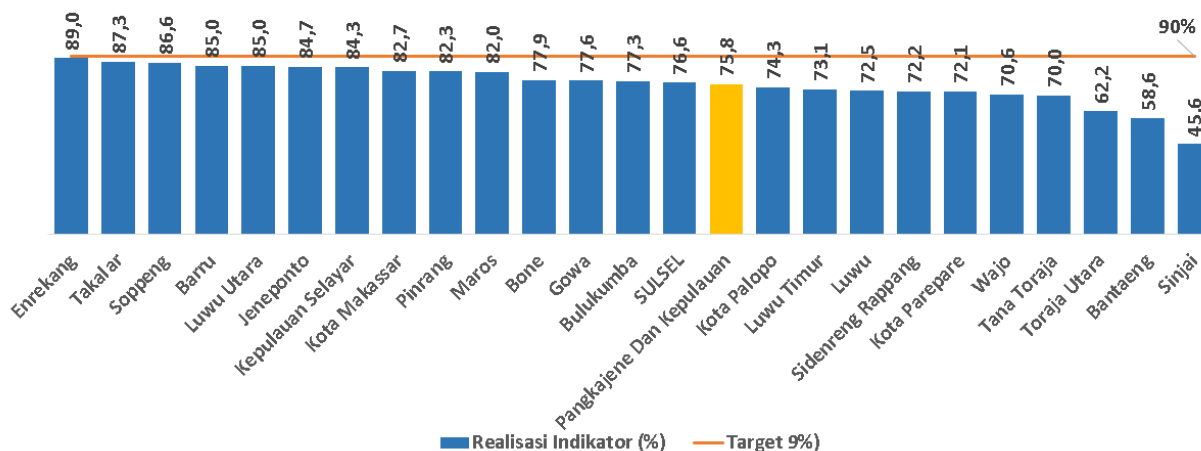


Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk

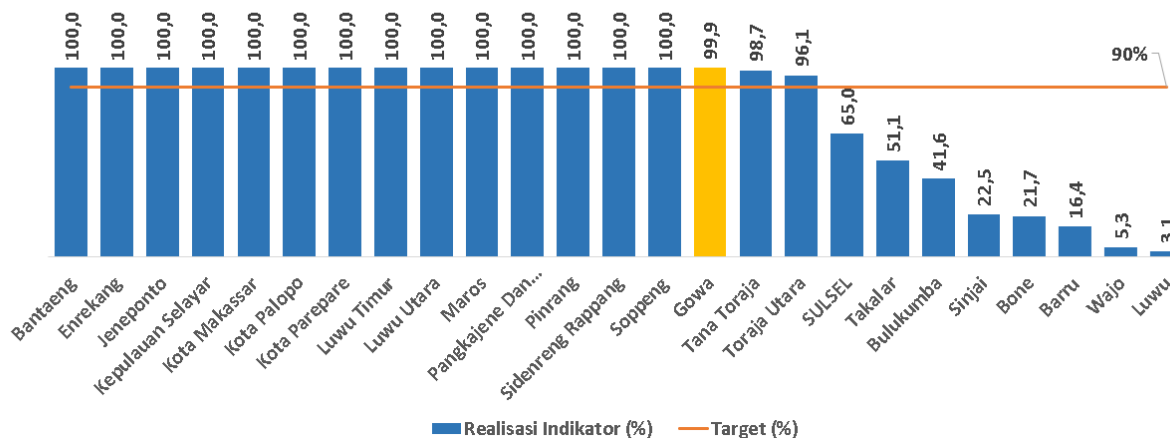




Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya

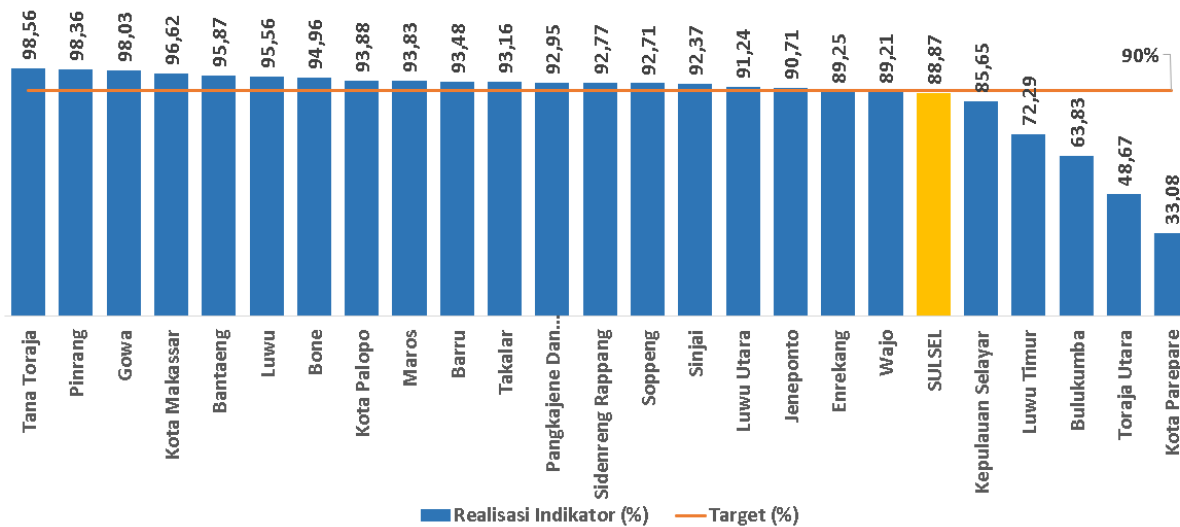


Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi

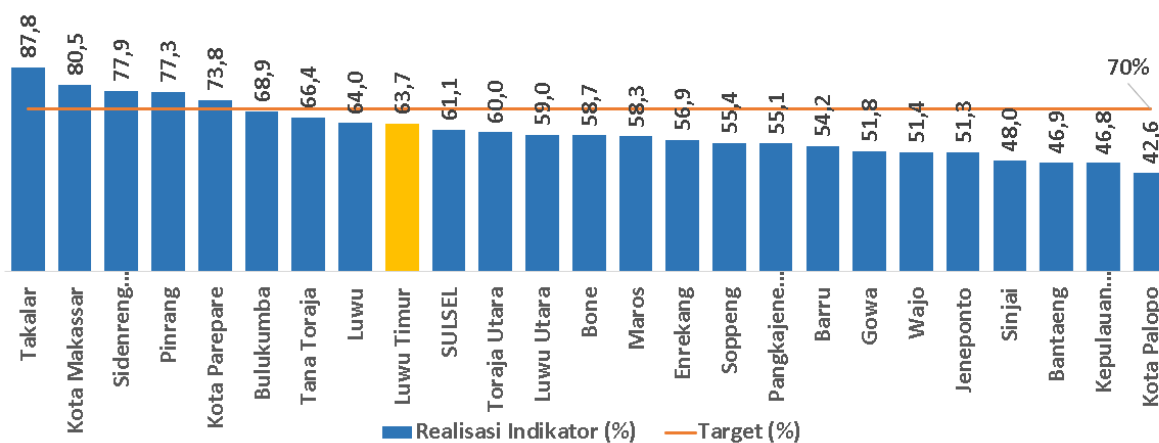




Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

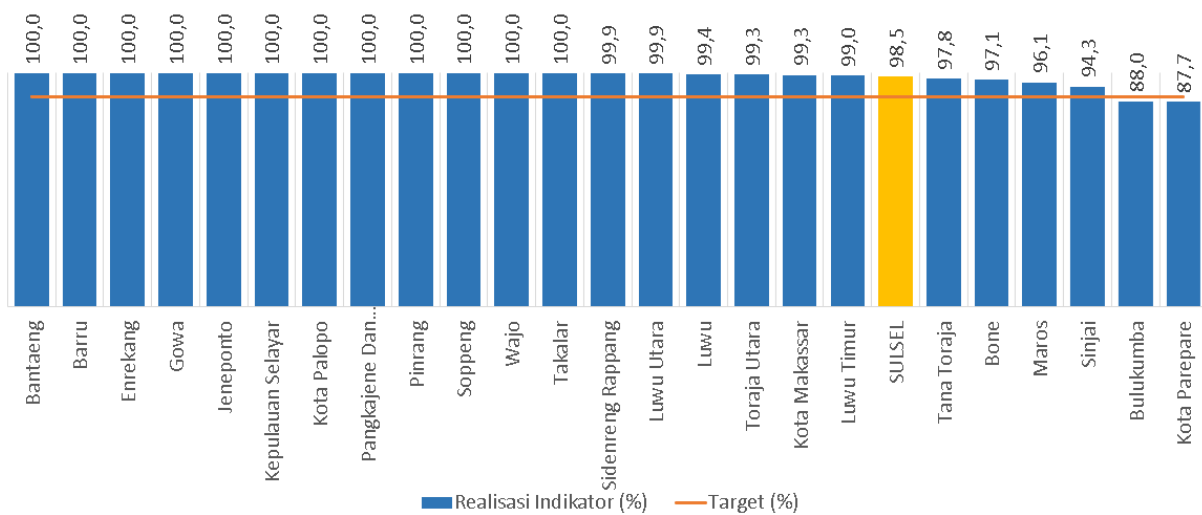


Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

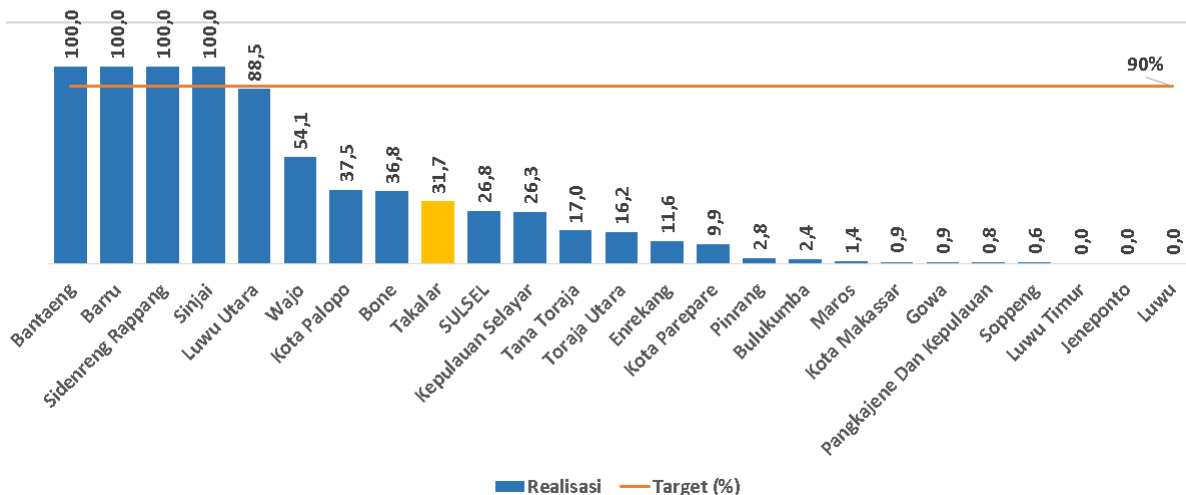




Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

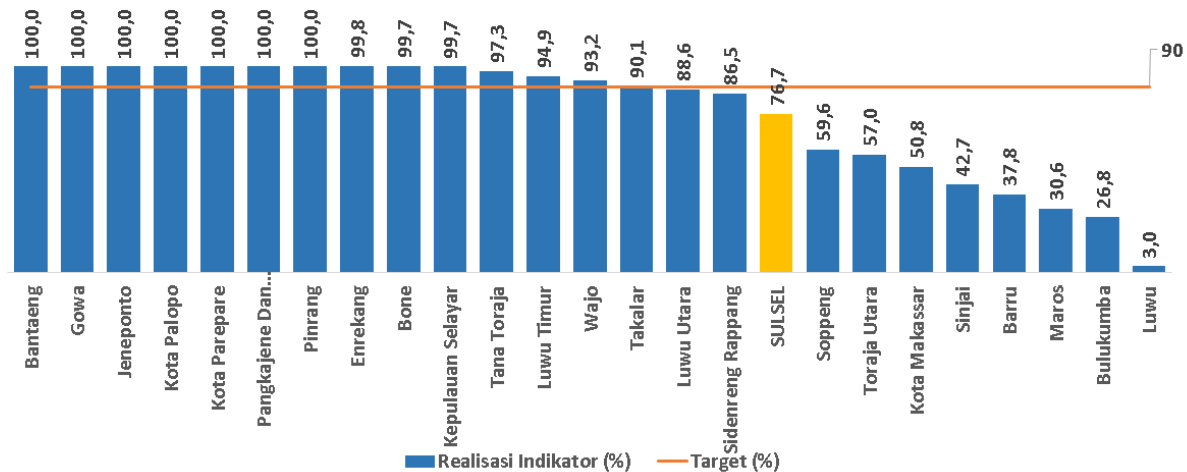


Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri

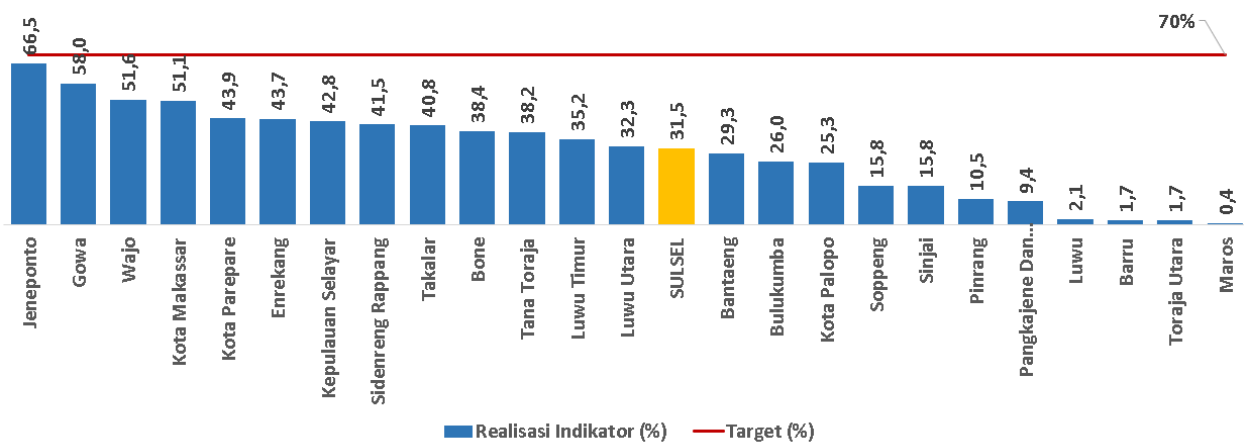




Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan



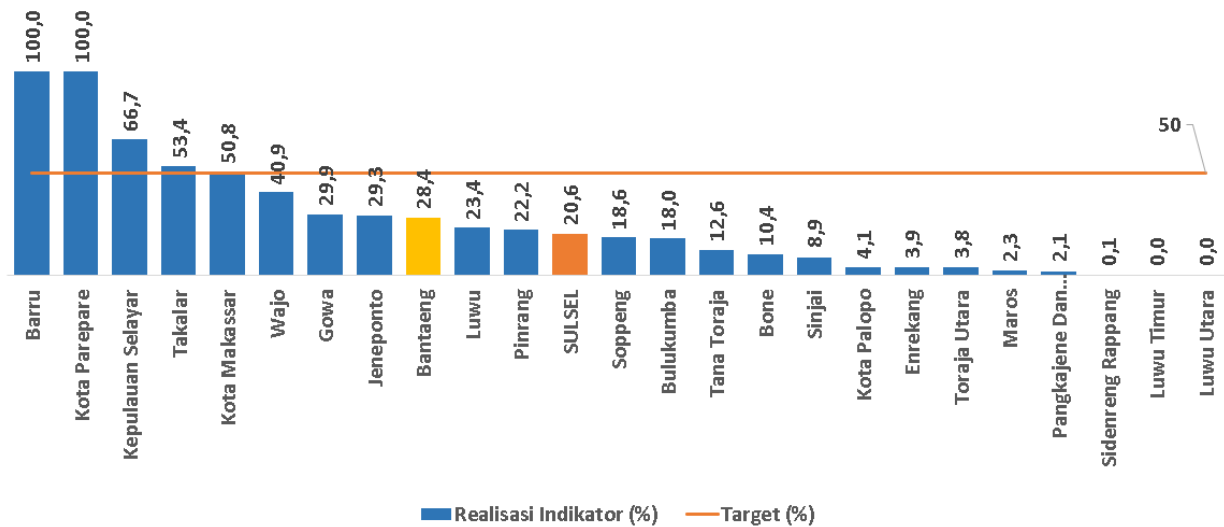
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan



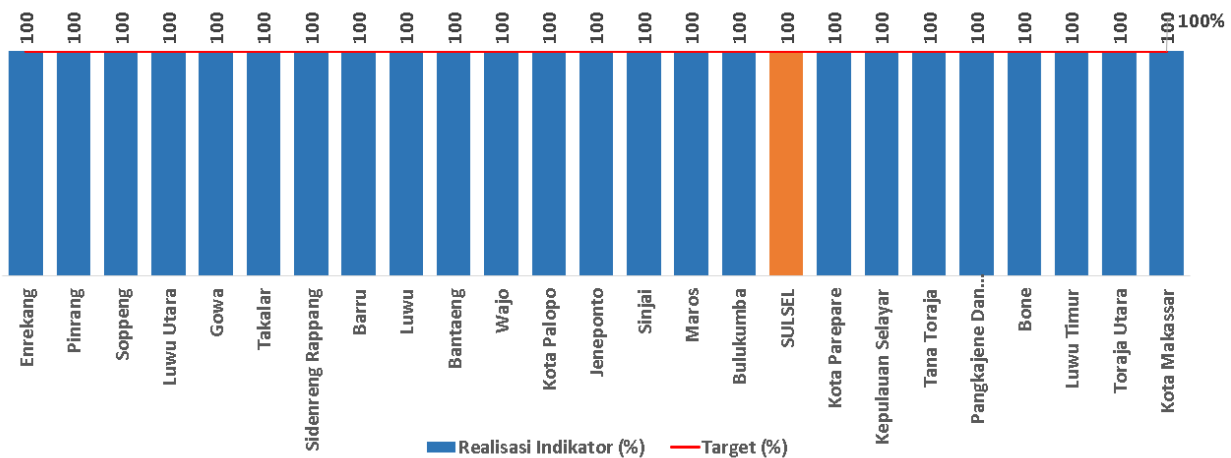


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi



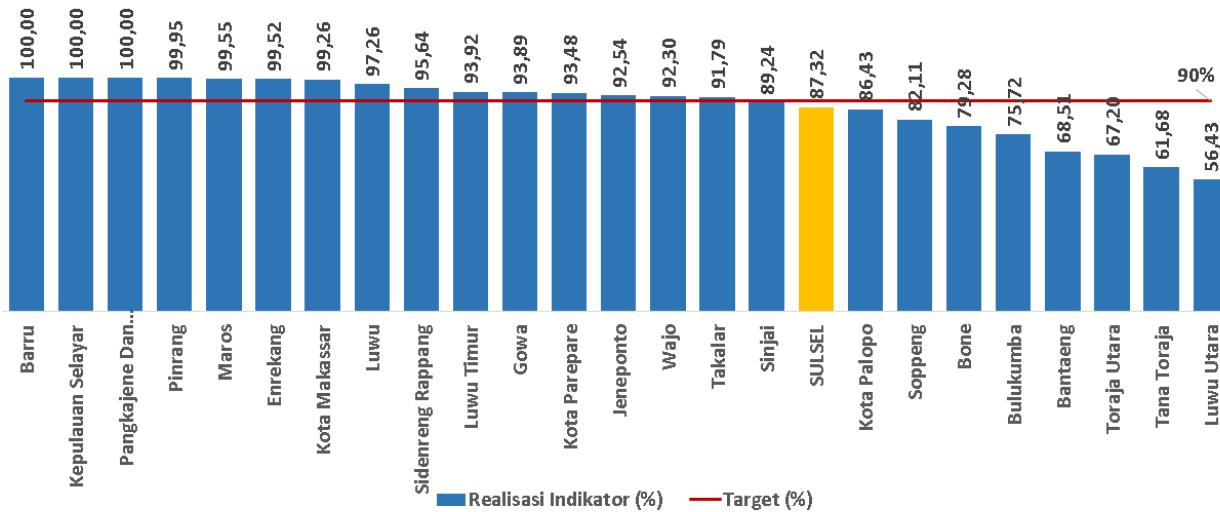
Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak



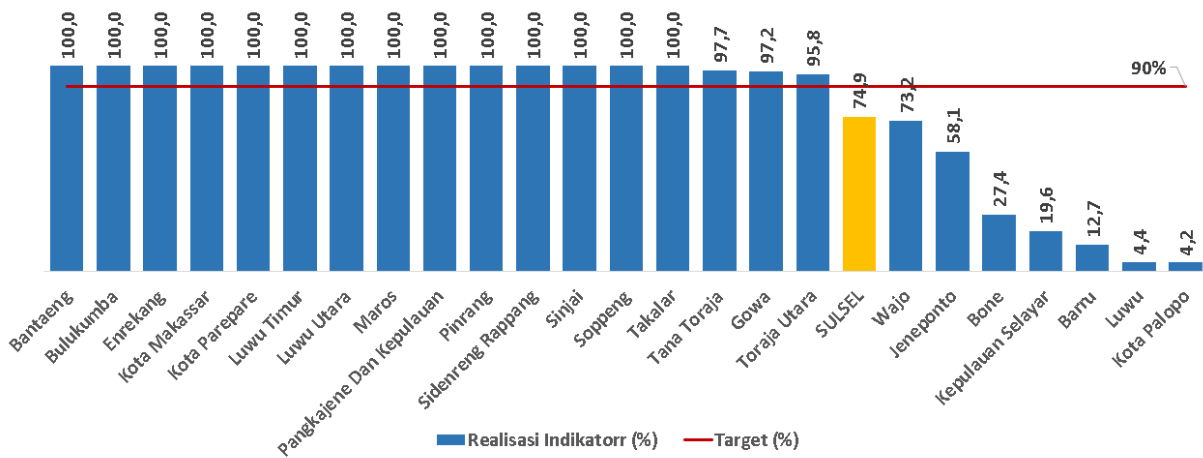


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak



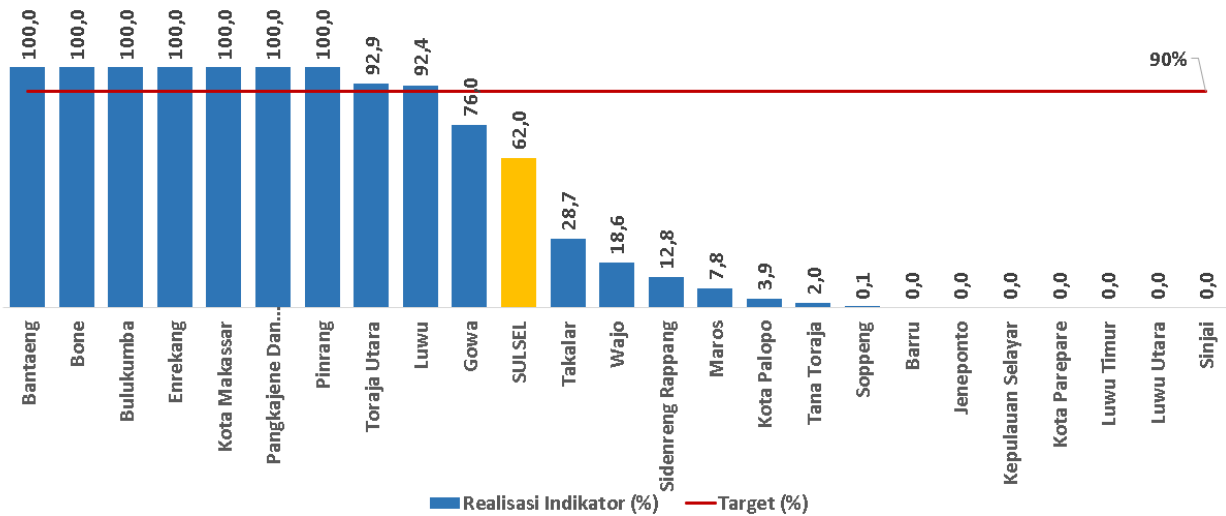
Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan



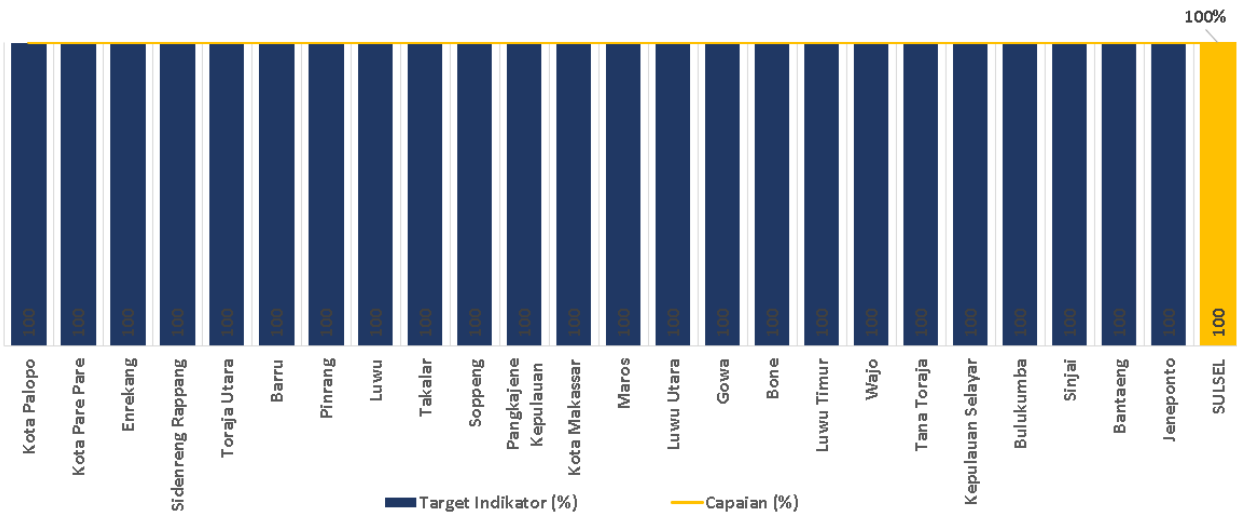


LAPORAN TPPS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur

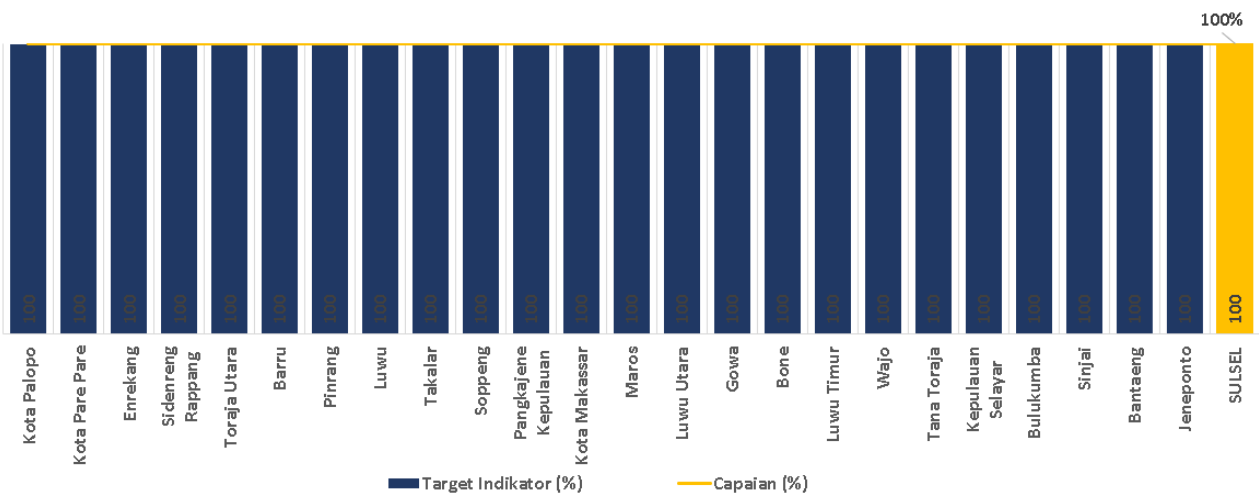


Terselenggara Rapat Koordinasi Di Tingkat Kabupaten/Kota

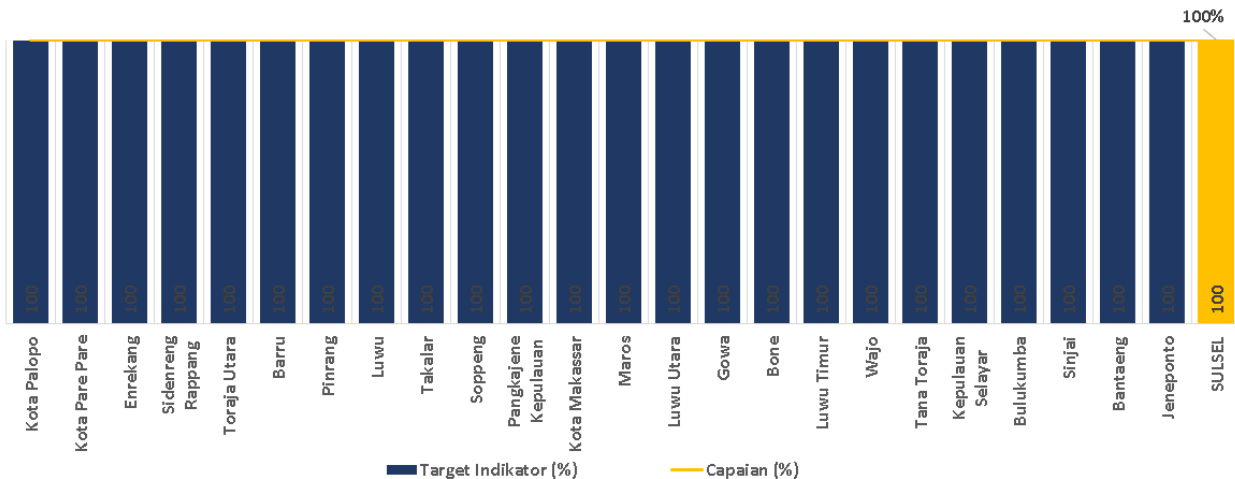




Terselenggaranya Rembug Stunting Tingkat Kecamatan



Tersedia kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting



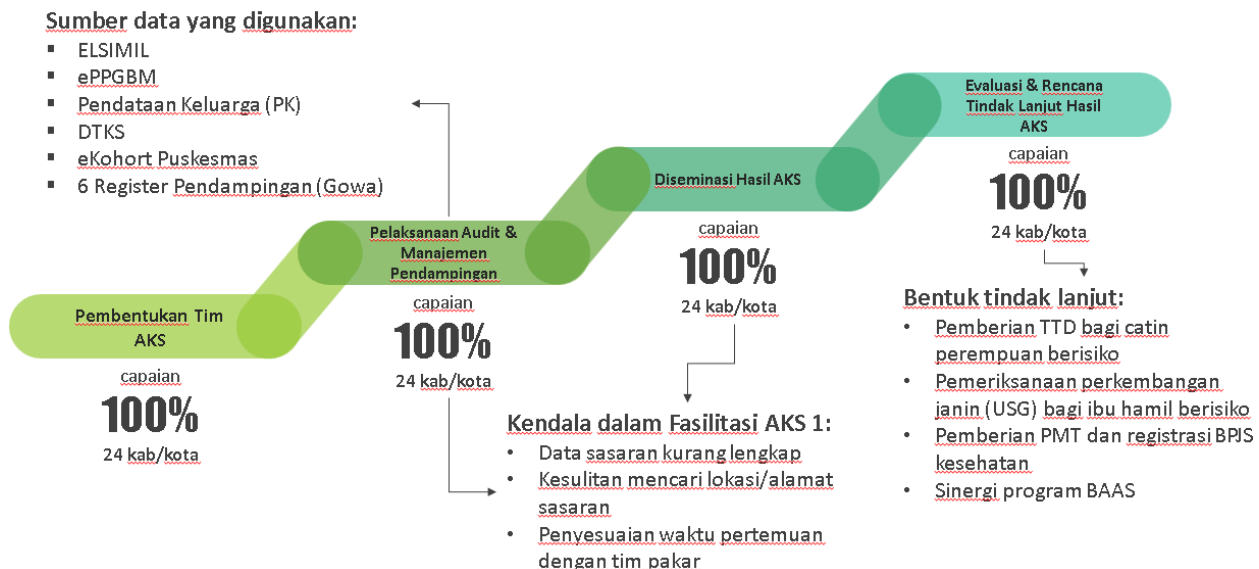


TOTAL PENDAMPINGAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) TERHADAP SASARAN PPS

No.	Kabupaten/Kota	Catin/CaPUS	Bumil	Bupas	Baduta	Total
1	Gowa	1.143	4.299	4.059	10.373	19.874
2	Kota Makassar	996	3.502	2.933	9.351	16.782
3	Bone	1.445	4.520	3.263	6.547	15.775
4	Jeneponto	563	3.102	3.987	6.614	14.266
5	Luwu Utara	507	2.345	1.929	5.351	10.132
6	Maros	650	2.882	2.821	3.747	10.100
7	Sidrap	664	3.437	1.885	2.950	8.936
8	Luwu	637	2.229	2.088	3.857	8.811
9	Pangkep	727	2.699	1.695	3.668	8.789
10	Takalar	413	3.044	2.041	2.693	8.191
11	Luwu Timur	459	2.518	1.958	2.953	7.888
12	Bulukumba	570	2.394	910	3.669	7.543
13	Toraja Utara	247	1.851	1.270	3.409	6.777
14	Pinrang	435	1.855	1.382	3.005	6.677
15	Bantaeng	165	1.483	1.551	3.340	6.539
16	Enrekang	319	1.502	1.201	3.159	6.181
17	Tana Toraja	165	1.310	2.041	2.652	6.168
18	Soppeng	850	1.293	1.079	2.719	5.941
19	Kota Palopo	278	1.236	1.061	2.139	4.714
20	Wajo	618	1.441	1.244	1.387	4.690
21	Barru	394	1.276	1.248	1.755	4.673
22	Sinjai	444	1.405	835	1.432	4.116
23	Kota Parepare	132	727	518	2.007	3.384
24	Kep. Selayar	148	691	699	1.402	2.940
	Sulsel	12.969	53.041	43.698	90.179	199.887

Sumber: DASHBOARD ELSIMIL – BKKBN SULSEL, 1 JAN-20 DES 2023

CAPAIAN REALISASI AUDIT KASUS STUNTING PROVINSI SULAWESI SELATAN





RENCANA KERJA TPPS

PROGRAM KEGIATAN(1)	PROGRAM KEGIATAN(2)
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	ADVOKASI DAN KIE TENTANG PROMOSI
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	GIZI ANAK DAN PENCEGAHAN STUNTING
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBERDAYAAN KAMPUNG KB DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	FASILITASI PENYUSUNAN STRATEGI KPP
PENYEDIAAN FASILITAS PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI TENAGA KESEHATAN KB	KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
MONITORING AUDIT KASUS STUNTING	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PENDAMPINGAN IBU HAMIL DAN IBU PASCAPERSALINAN	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KEGIATAN(3)	PROGRAM KEGIATAN(4)
FORUM KOORDINASI KONVERGENSI PPS	PENCEGAHAN DAN TATALAKSANA WASTING/GIZI BURUK
PELATIHAN/ORIENTASI BAGI TIM TPK	GIZI IBU DAN GIZI REMAJA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERANCANGAN VALIDITAS DATA STUNTING YANG TERSTANDARISASI
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM TRANSFER KNOWLEDGE TENTANG STUNTING BERBASIS MASYARAKAT
MONEV TPK, TPPS, DAN SATGAS	DISEMINASI DATA UNTUK MELAPORKAN HASIL AKHIR TERKAIT KONDISI STUNTING
REKOMENDASI KEBIJAKAN HASIL STUDI KASUS STUNTING PROVINSI	MANAJEMEN DATA TERPADU